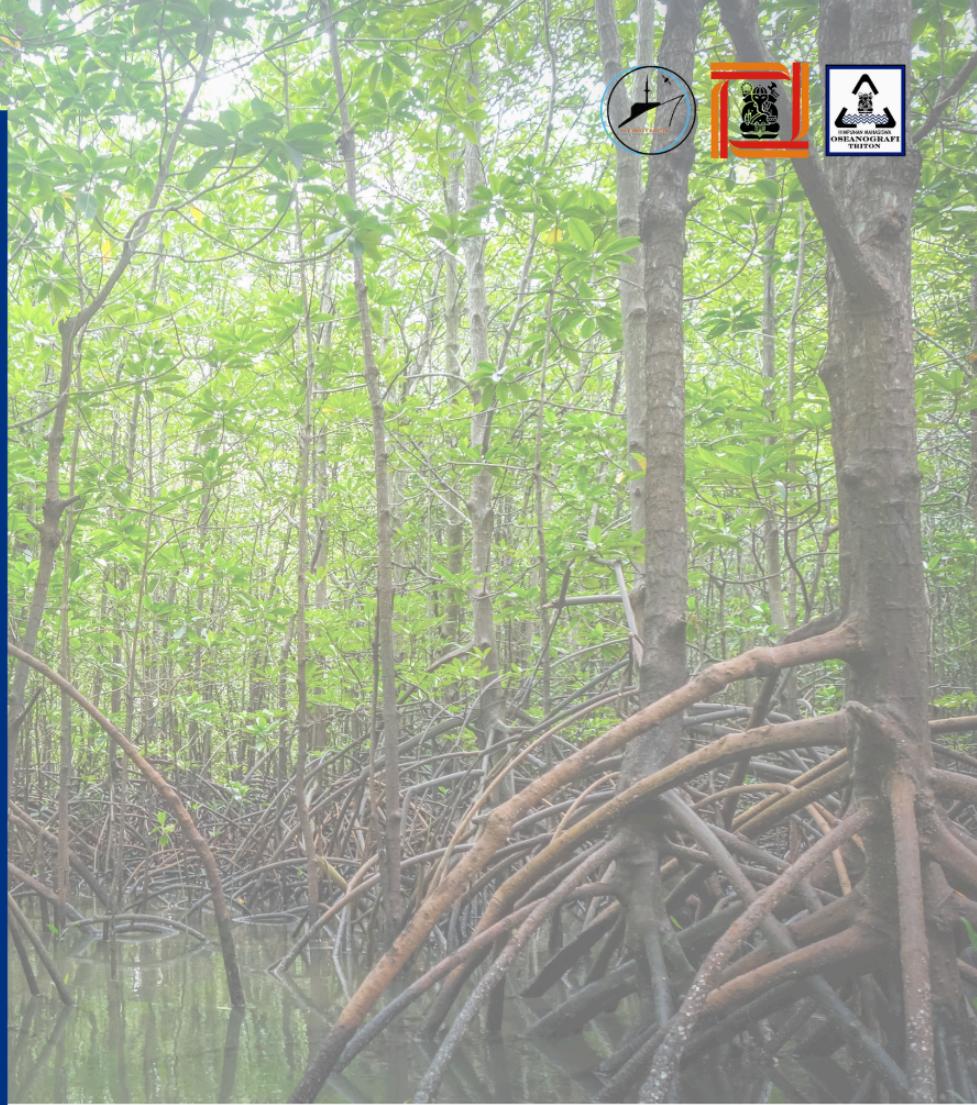




2024

POLICY BRIEF

KAJIAN TATA RUANG



Tim Penyusun

Andis Destrian Irianto¹, Ferio Zjidan Cassane¹, Fatiya Auliya Haris¹, Zeba Liqueiza Shakira Kudus¹, Muhammad Nabil Hafiz¹, Joshua Yosianto², Ayu Cahyani²

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung

² Oseanografi, Institut Teknologi Bandung

Ringkasan

Isu Kunci

- 1) Kurang berkembangnya Ekowisata Mangrove di Desa Pengarengan
- 2) Adanya potensi alih fungsi dan kepemilikan lahan tambak garam Masyarakat
- 3) Polusi lingkungan akibat kegiatan pabrik maupun PLTU
- 4) Tata ruang Desa Pengarengan yang melestarikan lingkungan dan perekonomian warga

Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan tata ruang yang dapat diterapkan di Desa Pengarengan untuk melestarikan lingkungan dan perekonomian potensial warga: (1) Perumusan kebijakan pengembangan dan peremajaan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung ekowisata mangrove; (2) Pengadaan program ekowisata mangrove terpadu yang melibatkan banyak pihak dan bermanfaat lebih; (3) Pengembangan industri kreatif yang linear dengan ekowisata mangrove; (4) Pengadaan program peningkatan produksi dan nilai hasil tambak garam; (5) Pengadaan program pemberdayaan petani dan nelayan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa; (6) Pembuatan rencana tata ruang Desa Pengarengan berskala zonasi bagi zona lindung dan budidaya.

Melalui pendekatan SWOT, IFAS, EFAS, dan TOWS, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi kebijakan terkait isu-isu tata ruang di Desa Pengarengan. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu-isu tata ruang di Desa Pengarengan meliputi perkembangan ekowisata mangrove, alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta kualitas lingkungan akibat polutan. Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai alternatif pengembangan adalah strategi agresif, yang berfokus pada kekuatan dan peluang yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain pengembangan dan peremajaan infrastruktur ekowisata mangrove, pengadaan program ekowisata terpadu, pengembangan industri kreatif yang sejalan dengan ekowisata mangrove, peningkatan produksi tambak garam, pemberdayaan petani dan nelayan, serta perencanaan tata ruang Desa Pengarengan.

Pengembangan Kawasan Pesisir Desa Pengarengan yang mendukung Potensi Pariwisata, Industri Kecil dan Menengah, dan Perikanan yang Berkelanjutan dari Segi Penataan dan Pengendalian Ruang

Pendahuluan

Terletak di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Desa Pengarengan merupakan wilayah pesisir yang memukau. Membentang sepanjang kurang lebih 6 kilometer di Pantai Utara Cirebon, desa ini memiliki posisi strategis yang membelah Teluk Cirebon dan Semenanjung Tanjung Jati.

Pengarengan dikenal sebagai salah satu produsen garam terbesar di wilayah Cirebon. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi tulang punggung perekonomian desa, dengan komoditas unggulan berupa ikan bandeng dan udang. Keberadaan Desa Pengarengan tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga vital bagi perekonomian lokal dan regional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2016, hutan mangrove di Kabupaten Cirebon memiliki luas 1.780 ha dengan rincian 1.100 ha yang berkondisi baik, 200 ha yang berkondisi sedang, 480 ha yang berkondisi rusak, 100 ha yang sedang dalam rehabilitasi serta 100 ha yang berubah fungsi, dan mangrove ini di dominasi pada kawasan Pangenan khususnya Desa Pengarengan.

Desa Penghasil Garam dan Kawasan Mangrove Tertua

Desa Pengarengan, yang terletak di pesisir utara Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merupakan komunitas yang sebagian besar penduduknya mengandalkan laut dan tambak sebagai sumber penghidupan. Profesi utama warga meliputi nelayan, petani garam, dan pembudidaya ikan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Cirebon tahun 2014 yang dikutip oleh Jason Trikobery dkk. (2017), Pengarengan berkontribusi signifikan terhadap produksi garam di kecamatan tersebut, dengan 20 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang menghasilkan total 5.247 ton garam.

Selain potensi ekonominya, Pengarengan juga dikenal dengan kawasan mangrove yang termasuk salah satu yang tertua di Kabupaten Cirebon. Ekosistem mangrove ini menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata berbasis konservasi. Keunikan kawasan ini terletak pada keanekaragaman jenis mangrove yang tumbuh sesuai dengan zonasi alamnya, serta kekayaan flora dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut. Hal ini menjadikan Pengarengan sebagai lokasi ideal untuk pengembangan ekowisata yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati.

Kondisi Kawasan Mangrove

Pengarengan

Keanekaragaman hayati merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan suatu ekosistem, termasuk ekosistem mangrove. Menurut buku Keanekaragaman Hayati Kawasan Mangrove Pengarengan (2021), vegetasi mangrove di daerah ini terdiri dari spesies yang tumbuh secara alami dan yang ditanam melalui upaya konservasi.

Mangrove di Sungai Pengarengan terbagi menjadi dua kelompok utama: mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Kelompok mangrove sejati mencakup api-api hitam (*Avicennia alba*), api-api putih (*Avicennia marina*), jeruju hitam (*Acanthus ilicifolius*), nipah (*Nypa fruticans*), bakau bandu (*Rhizophora mucronata*), dan pidada merah (*Sonneratia caseolaris*).

Kelompok mangrove asosiasi meliputi tuba laut (*Derris trifoliata*), widuri (*Calotropis gigantea*), beluntas (*Pluchea indica*), krokot laut (*Sesuvium portulacastrum*), ketul (*Bidens pilosa*), seruni (*Wedelia bioflora*), rambusa (*Passiflora foetida*), ketapang (*Terminalia catappa*), kirinyuh (*Chromolaena odorata*), rumput (*Chloris barbata*), dan rumput tepi-telaga (*Schoenoplectus lacustris*).

Penelitian yang dilakukan oleh Afni Atika Marpaung dkk. (2021) di kawasan hutan mangrove Pengarengan, Kabupaten Cirebon, mengungkapkan keberadaan 24 spesies tumbuhan. Semua spesies ini termasuk dalam kelas Magnoliopsida dan terdiri dari 10 ordo, 15 famili, dan 23 genus.

Selain kekayaan flora, fauna juga berperan penting dalam ekosistem mangrove Pengarengan. Studi oleh Ris Hadi Purwanto dkk. (2021) mengidentifikasi beragam fauna, termasuk enam spesies burung, tiga spesies *reptil*, satu spesies mamalia, tiga spesies *malacostraca*, satu spesies *Actinopterygii*, dan satu spesies *gastropoda*. Burung air merupakan fauna yang paling mudah diamati, sering terlihat di cabang pohon, kolam, atau di antara nekromassa.

Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada sejumlah masyarakat Desa Pengarengan diketahui bahwa Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan memiliki keterbatasan infrastruktur yang memadai sehingga aksesibilitas untuk menuju objek wisata dapat dikatakan kurang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roslinda dan Mondina (2023) mengukur aksesibilitas ekowisata mangrove yang ditilik dari segi infrastrukturnya melalui tiga hal, yaitu kondisi jalan masuk ke lokasi, ketersediaan sarana transportasi, serta ketersediaan informasi berupa signage. Ketiga hal ini dalam studi kasus Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan masing-masingnya masih memiliki beberapa kekurangan yang patut untuk diperhatikan.

Kondisi jalan di Desa Pengarengan dapat dikatakan beragam. Jalan utama desa merupakan jalanan yang tergolong baik dengan struktur pengecoran atau aspal. Namun, di beberapa titik masih ditemukan kondisi jalan yang tidak terawat seperti jalan menuju tambak garam serta jalan menuju Pos Dermaga Polisi Air sebagai gerbang awal menuju ekowisata mangrove. Hal ini tentunya dapat menghambat perjalanan wisatawan serta memberikan kesan

yang kurang baik dari segi ekonomi maupun estetika ekowisata mangrove. Selain itu, tidak ditemukan signage yang cukup untuk menunjukkan rute perjalanan wisata di darat maupun di perairan.

Dari pos dermaga polisi air, wisatawan harus menggunakan perahu untuk menuju objek wisata mangrove yang terletak di pinggir muara sungai, namun, sejak beberapa tahun silam kondisi perahu khusus pengangkut wisatawan mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan peremajaan seperti seharusnya. Hal tersebut menyebabkan wisatawan mesti dialihkan menggunakan perahu milik nelayan setempat yang tentunya tidak selalu berada di dermaga. Tentunya jika dibiarkan terus menerus kondisi ini akan menurunkan keefektifan waktu perjalanan dan kesan wisatawan terhadap Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan.

Infrastruktur penunjang Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan lainnya yang mesti diberi perhatian lebih, yaitu objek utama hutan mangrove. Kondisi stagnasi dari pengembangan Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan berdampak pula pada perawatan dari lingkungan sekitar objek utama hutan mangrove. Ketika tim kami melakukan survei lapangan, infrastruktur seperti *walking track*, spot swafoto, *main stage*, serta beberapa prasarana lainnya tampak terbengkalai tanpa adanya perawatan maupun petugas yang merawat walaupun ditemukan adanya jejak-jejak pembangunan walking track yang diperpanjang ke arah muara sungai. Ditemukan juga banyaknya sampah dan limbah rumah tangga di pinggiran sungai. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan wisatawan serta SDM pekerja di objek utama hutan mangrove, padahal dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 57 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon pada pasal 23 ayat (1) jelas tertulis bahwa seharusnya pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan.

Menurut penuturan Kepala Desa Pangeran, kurangnya penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang minim diakibatkan oleh kurangnya dana untuk mengembangkan SDM maupun sarana prasarana penunjang wisata sehingga terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung. Selama ini, pendanaan Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan hanya mengandalkan dana dari CSR, Cirebon Power, serta dinas setempat karena BUMDes belum aktif berjalan untuk menghasilkan modal, Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat setempat yang berpendapat bahwa belum keseluruhan masyarakat terlibat aktif dalam mengembangkan Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan.

Kegiatan Ekonomi Masyarakat Penunjang Ekowisata Desa Pengarengan

Masyarakat Desa Pengarengan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh/swasta, serta nelayan (Data Potensi Desa, 2022) Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui juga terdapat beberapa masyarakat yang berwirausaha seperti membuka usaha warung kelontong. Pada tahun 2022, Desa Pengarengan memiliki luasan tambak garam sebesar 50% dari total luas lahan desa yang ada atau setara dengan 160.159 hektar (Taqyudin, 2022) Hal ini sebagai akibat posisi geografis Desa Pengarengan yang berada di pesisir laut utara Jawa sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi petani garam. Namun, beberapa tahun terakhir terdapat isu adanya proses jual beli lahan tambak garam masyarakat secara bertahap untuk dialihfungsikan menjadi PLTU. Rencana ini sebenarnya patut untuk ditinjau lebih lanjut kelayakannya mengingat lokasi tambak garam berada dekat dengan pemukiman warga sehingga dikhawatirkan dapat mengancam segi kesehatan maupun perekonomian masyarakat.

Selain bekerja sebagai petani, baik itu petani agraria maupun tambak garam dan ikan, beberapa masyarakat juga memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik lar maupun batu bara yang terletak di desa sebelah. Meskipun menghasilkan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat pabrik-pabrik ini disinyalir menimbulkan polusi udara, terutama bau, yang sangat terasa ke permukiman Desa Pengarengan setiap pagi hari dan sore hari. Mata pencarian dominan lainnya di Desa Pengarengan, yaitu nelayan. Terdapat sebuah permukiman nelayan di Desa Pengarengan yang terletak persis di sebelah sungai dengan kapal-kapal nelayan di dekatnya.

Kondisi Kepemilikan Lahan

Di wilayah ini khususnya pesisir, banyak tambak udang yang dimiliki oleh individu, namun akses terhadap kawasan ini mengalami tantangan serius karena lahan telah dibeli oleh entitas lain seperti perusahaan besar Avian. Situasi ini berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal, khususnya bagi nelayan tradisional yang kesulitan mengakses lahan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, lahan tambak garam yang dikelola dalam skala besar umumnya juga dimiliki oleh individu. Dalam praktiknya, tengkulak lokal berperan penting dengan membeli hasil tambak dari petani dan menjualnya ke kota besar seperti Bandung, menciptakan rantai ekonomi yang menghubungkan pedesaan dengan perkotaan. Krisis air bersih di daerah pesisir diperburuk oleh institusi air laut, yang menurunkan kualitas air di pemukiman. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik dapat menggunakan air bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka, sementara masyarakat kurang mampu sangat bergantung pada bantuan desa untuk mendapatkan air bersih, memperlihatkan kesenjangan akses terhadap sumber daya vital antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, pengembangan ekowisata mangrove di wilayah pesisir masih berada pada tahap awal dengan banyak lahan yang belum tertata rapi. Meskipun demikian, terdapat potensi ekonomi yang besar dari kegiatan ini, terutama melalui penjualan bibit mangrove yang saat ini masih dilakukan secara tradisional, menandakan perlunya inovasi dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Analisis ini menyoroti berbagai dinamika kepemilikan lahan di

wilayah pesisir dan dampaknya pada ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada tantangan yang dihadapi nelayan dan petani tambak, serta potensi pengembangan ekowisata mangrove, dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dampak PLTU Terhadap Kawasan di Sekitarnya

Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diduga menyebabkan penurunan kualitas air perairan, ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat keruh terutama pada bulan Maret-April, yang berdampak negatif pada hasil panen udang. Selain itu, masalah sedimentasi di muara turut mengganggu transportasi kapal, menghambat kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Walaupun PLTU memberikan beberapa manfaat seperti penerangan dan pelatihan, masyarakat setempat cenderung lebih merasakan manfaat yang berasal dari dinas pemerintahan daripada dari PLTU. Keluhan juga muncul terkait birokrasi yang rumit dan seringnya pergantian penyuluh, yang menambah kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan dan program yang ditawarkan. Pengembangan wisata mangrove di sekitar kawasan PLTU masih jauh dari ideal, terutama karena banyaknya limbah di daerah sungai dan fasilitas yang belum memadai. Koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat juga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi ekowisata di daerah ini. Masalah intrusi air laut yang mempengaruhi kualitas air bersih, serta abrasi dan sedimentasi yang berdampak pada pemukiman dan tambak garam, menambah kompleksitas tantangan tata ruang di kawasan ini. Dampak lingkungan ini mengancam kesejahteraan masyarakat dan memerlukan penanganan segera. Analisis ini menggarisbawahi berbagai dampak negatif dari aktivitas PLTU terhadap lingkungan, sosial ekonomi, ekowisata, dan tata ruang di kawasan sekitarnya. Penekanan pada isu-isu kritis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Sertifikasi Tanah untuk Pembangunan Rumah di Kawasan Banjir

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Pengarengan Diketahui bahwa mekanisme pengurusan sertifikasi tanah di desa dimulai dari Masyarakat mengajukan sertifikasi tanah ke Pemerintah Desa, dilanjutkan ke Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, dan akhirnya ke Kementerian ATR/BPN. Biaya pengurusan sertifikasi tanah seluas 1 hektar mencapai sekitar 7 juta rupiah. Namun, pada tahun 2022-2023, pemerintah meluncurkan program sertifikasi gratis yang hanya memerlukan biaya operasional sebesar 150 ribu rupiah, dengan rincian 100 ribu untuk operasional dan 50 ribu untuk meterai. Program ini turut membantu masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, dalam memperoleh legalitas tanah. Biaya pengurusan tambak per meter persegi bervariasi tergantung pada lokasi. Di daerah yang dekat dengan laut, biaya mencapai sekitar 50 ribu rupiah per meter persegi, sedangkan untuk daerah yang dekat dengan permukiman, biaya tersebut berkisar antara 80-90 ribu rupiah per meter persegi. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tanda Nomor (TN), dan bukti penguasaan fisik tanah selama sekitar 20 tahun. Selain itu, disarankan juga untuk membuat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terlebih dahulu. Meskipun proses pengurusan dapat memakan waktu 1-2 tahun, banyak masyarakat Desa Pengarengan telah berhasil mendapatkan sertifikat tanah berkat program pemerintah. Program ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi tanah mereka.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS yang memperhatikan unsur SWOT isu tata ruang Desa Pengarengan, didapatkan hasil bahwa strategi kebijakan yang sesuai untuk diterapkan

pada Desa Pengarengan adalah Strategi Agresif (titik skor = (0,007, 0,857)) yang berupaya meningkatkan kekuatan dan peluang Desa Pengarengan guna memperkuat solusi dari isu yang ada. Berikut merupakan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

1. Diperlukan adanya kebijakan pengembangan dan peremajaan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung ekowisata mangrove guna menjaga stabilitas arus wisata. Infrastruktur yang perlu untuk diperhatikan dalam program ini di antaranya, jalan yang diakses menuju ekowisata mangrove, transportasi darat dan air bagi wisatawan dan pengelola, prasarana pendukung seperti area parkir, toilet umum, dan pusat informasi, serta adanya konektivitas internet yang mampu mendukung promosi digital melalui pengunjung. Tentunya hal ini perlu diimbangi dengan arus pendanaan yang baik.
2. Selain memperhatikan infrastruktur penunjang, Ekowisata Mangrove Desa Pengarengan juga memerlukan program pengembangan ekowisata mangrove terpadu yang mampu melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, komunitas terkait, maupun pengunjung untuk senantiasa bekerja sama meningkatkan manfaat ekowisata dari segi lingkungan, keamanan serta penambahan nilai ekonomi.
3. Adanya potensi UMKM dan perdagangan di Desa Pengarengan memberikan sebuah ide baru untuk mengembangkan industri kreatif berbasis mangrove lewat penyediaan pelatihan kewirausahaan dan penyediaan modal untuk mengembangkan kewirausahaan yang linear dengan Ekowisata Mangrove.
4. Pemerintah disarankan dapat menjalankan program yang dapat meningkatkan produksi dan nilai garam tambak setempat secara berkelanjutan, misalnya dengan membentuk koperasi petani garam untuk memperkuat akses pasar untuk kemudian dilanjut dengan adanya program pemasaran dengan branding khusus. Hal ini dilatarbelakangi oleh usaha pengembangan potensi Desa Pengarengan sebagai wilayah penghasil garam yang menjadi ladang ekonomi dari sebagian besar masyarakatnya.
5. Perlunya pengadaan program pemberdayaan nelayan dan petani garam guna meningkatkan keterampilan SDM, kecakapan teknologi, serta kesejahteraan sosial masyarakatnya.
6. Mempertimbangkan keanekaragaman kegiatan budidaya yang potensial serta adanya aktivitas konservasi alam (mangrove), maka pemerintah yang berkaitan direkomendasikan untuk membuat perencanaan ruang dalam skala zoning lindung dan budidaya dari Desa Pengarengan untuk melestarikan eksistensi masing-masing kegiatan, memaksimalkan potensi kegiatan sesuai dengan karakteristik lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan desa.

Daftar Pustaka

- Aryunda H. 2011. Dampak ekonomi pengembangan kawasan ekowisata Kepulauan Seribu. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 22(1):1–16.
- Ayob MZ, Saman FM, Hussin ZH, Jusoff K. 2009. Tourist' satisfaction on Kilim River mangrove forest ecotourism servis. International Journal Business Management. 4(7):76–84.
- Bergin, J. & C. Price. 1994. The travel cost method and landscape quality. Landscape Research, 19(1): 21-23. <https://doi.org/10.1080/01426399408706416>.
- Carugati, L., B. Gatto, E. Rastelli, M.L. Martire, C. Coral, S. Greco, & R. Danovaro. 2018. Impact of mangrove forests degradation on biodiversity and

- ecosystem functioning. *Scientific Reports*, 8(13298): 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31683-0>.
- Djamaluddin, R., Djabar, B., Otulowa, Z., Manembu, I. S., Rumengan, A. P., & Warow, V. (2021). Keanekaragaman dan konservasi mangrove di Indonesia. In Pengelolaan sumberdaya laut berkelanjutan (pp. 21-39). Unsrat Press.
- Herison, H., F. Yulianda, C. Kusmana, I.W. Nurjaya, & L. Adrianto. 2014. The existing condition of mangrove region of *Avicennia marina*: Its distribution and functional transformation. *J. of Tropical Forest Management*, 20(1):26-34.
- Jusoff, K. & D.H. Dahlan. 2008. Managing sustainable mangrove forests in Peninsular Malaysia. *J. of Sustainable Development*, 1(1): 88-96. <https://doi.org/10.5539/jsd.v1n1p88>.
- Kamal, E. & H. Haris. 2014. Komposisi dan vegetasi hutan mangrove di pulau-pulau kecil, di Pasaman Barat. *Ilmu Kelautan*, 19(2):113-120. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.19.2.113-120>.
- Kodikara, K.A.S., L.P. Jayatissa, M. Huxham, F. Guebas, & N. Koedam. 2017. The effects of salinity on growth and survival of mangrove seedlings changes with age. *Acta Botanica Brasilica*, 32(1): 37-46. <https://doi.org/10.1590/0102-33062017abb0100>.
- Marpaung, A. A., Mulyana, B., Purwanto, R. H., Sari, P. I., Hidayatullah, M. F., Putra, A. D., & Putra, I. S. R. (2022). Keanekaragaman Tumbuhan di Kawasan Hutan Mangrove Pengarengan Cirebon. *Journal of Forest Science Avicennia*, 4(2), 66–79. <https://doi.org/10.22219/avicennia.v4i2.18180>.
- Pattimahu, D.V., A. Kastanya, & P.E. Papilaya. 2017. Sustainable mangrove forest management analysis (a case study from Dusun Taman Jaya, West Seram Regency, Maluku). *International J. of Applied Engineering Research*, 12(24): 14895-14900.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2022). Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon. Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Purwanto, R. H., Mulyana, B., Satria, R. A., Yasin, E. H. E., Putra, I. S. R., & Putra, A. D. (2022). Spatial distribution of mangrove vegetation species, salinity, and mud thickness in mangrove forest in Pengarengan, Cirebon, Indonesia. *Biodiversitas*, 23(3). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230324>
- Roslinda, E. & Mondina, R. R., (2023). Persepsi Pengunjung Terhadap Daya Tarik Wisata Mangrove Setapuk di Kota Singkawang. *Makila: Jurnal Penelitian Kehutanan*, 18(1), 78-93. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila/article/view/11440>.
- Taqyudin, M. (2022). Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon). <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9811/2/BAB%20I.pdf>
- Trikobery, J., Rizal, A., Kurniawati, N., & Anna, Z. (2018). ANALISIS USAHA TAMBAK GARAM DI DESA PENGARENGAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON. CORE. https://core.ac.uk/outputs/294863061/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

LAMPIRAN

Tabel 1. Kekuatan Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon

Strength	Sumber	Bobot	Rating	Skor
[S1] Desa Pengarengan merupakan desa penghasil garam dengan total produksi 5.247 ton dan berkontribusi secara signifikan terhadap kecamatannya	1) Desa Penghasil Garam dan Kawasan Mangrove Tertua 2) Kegiatan Ekonomi Masyarakat Penunjang Ekowisata Desa Pangarengan	0,154	3	0,462
[S2] Desa Pengarengan memiliki potensi yang baik untuk hutan mangrove yang dimiliki, sekaligus sebagai kawasan mangrove tertua di Kabupaten Cirebon	1) Badan Pusat Statistik 2) Desa Penghasil Garam dan Kawasan Mangrove Tertua	0,308	5	1,538
[S3] Kawasan Mangrove Pengarengan memiliki keanekaragaman hayati yang ditunjukkan dengan banyaknya jenis kelompok mangrove berupa sejati dan asosiasi	1) Kondisi Kawasan Mangrove Pengarengan	0,231	4	0,923
[S4] Kawasan Mangrove Desa Pengarengan merupakan kawasan akan mangrove yang tumbuh secara alami serta ditanam sebagai upaya dalam konservasi	1) Kondisi Kawasan Mangrove Pengarengan	0,308	5	1,538
Total		1	17	4,462

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2. Kelemahan Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon

Weakness	Sumber	Bobot	Rating	Skor
[W1] Aksesibilitas untuk menuju Objek Wisata Mangrove terbilang sulit dan minim dalam penunjangnya	1) Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata Mangrove Desa Pangarengan	0,182	5	0,909
[W2] Kurangnya fasilitas penunjang seperti perahu untuk menuju Kawasan Wisata Mangrove	1) Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata Mangrove Desa Pangarengan	0,091	5	0,455
[W3] Kurangnya informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan untuk	1) Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata Mangrove Desa Pangarengan	0,091	5	0,455

Weakness	Sumber	Bobot	Rating	Skor
di Kawasan Wisata Mangrove				
[W4] Kurangnya dana yang dapat dikelola untuk meremajakan Ekowisata Mangrove oleh pemerintah setempat serta tidak berjalananya BUMDes	1) Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata desa Pangarengan	0,273	4	1,091
[W5] Adanya krisis air bersih di beberapa titik lokasi permukiman	1) Kondisi Kepemilikan Lahan	0,273	4	1,091
[W6] Banyaknya sampah yang berada di sekitar Kawasan Mangrove yang membuat berkurangnya nilai estetika sebagai kawasan ekowisata	1) Hasil Observasi Lapangan, 2024 2) Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekowisata Mangrove Desa Pangarengan	0,091	5	0,455
Total		1	28	4,455

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3. Peluang Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon

Opportunity	Sumber	Bobot	Rating	Skor
[O1] Berpotensi sebagai kawasan dalam pelestarian keanekaragaman hayati	1) Desa Penghasil Garam dan Kawasan Mangrove Tertua	0,190	3	0,571
[O2] Desa Pengarengan memiliki potensi yang baik terutama jika dilihat dari 5A sebagai kawasan wisata	1) Hasil Observasi Lapangan, 2024	0,190	5	0,952
[O3] Terdapat organisasi, komunitas, dan sejenisnya yang berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Wisata Mangrove Pengarengan seperti komunitas Vespa	1) Hasil Observasi Lapangan, 2024	0,190	4	0,762
[O4] Penduduk di Desa Pengarengan dominan berprofesi sebagai nelayan serta petani garam terutama yang berada di sekitar pesisir	1) Kegiatan Ekonomi Masyarakat Penunjang Ekowisata Desa Pangarengan	0,143	3	0,429
[O5] Kegiatan IKM atau perdagangan berpotensi meningkat sejalan dengan berkembangnya Wisata Mangrove di Desa Pengarengan	1) Hasil Analisis, 2024	0,190	5	0,952
[O6] Terdapat program bantuan sertifikasi tanah dari pemerintah yang	1) Sertifikasi Tanah untuk Pembangunan	0,095	2	0,190

Opportunity	Sumber	Bobot	Rating	Skor
meningkatkan potensi masyarakat memiliki kepemilikan tanahnya sendiri	Rumah di Kawasan Banjir			
Total		1	22	3,857

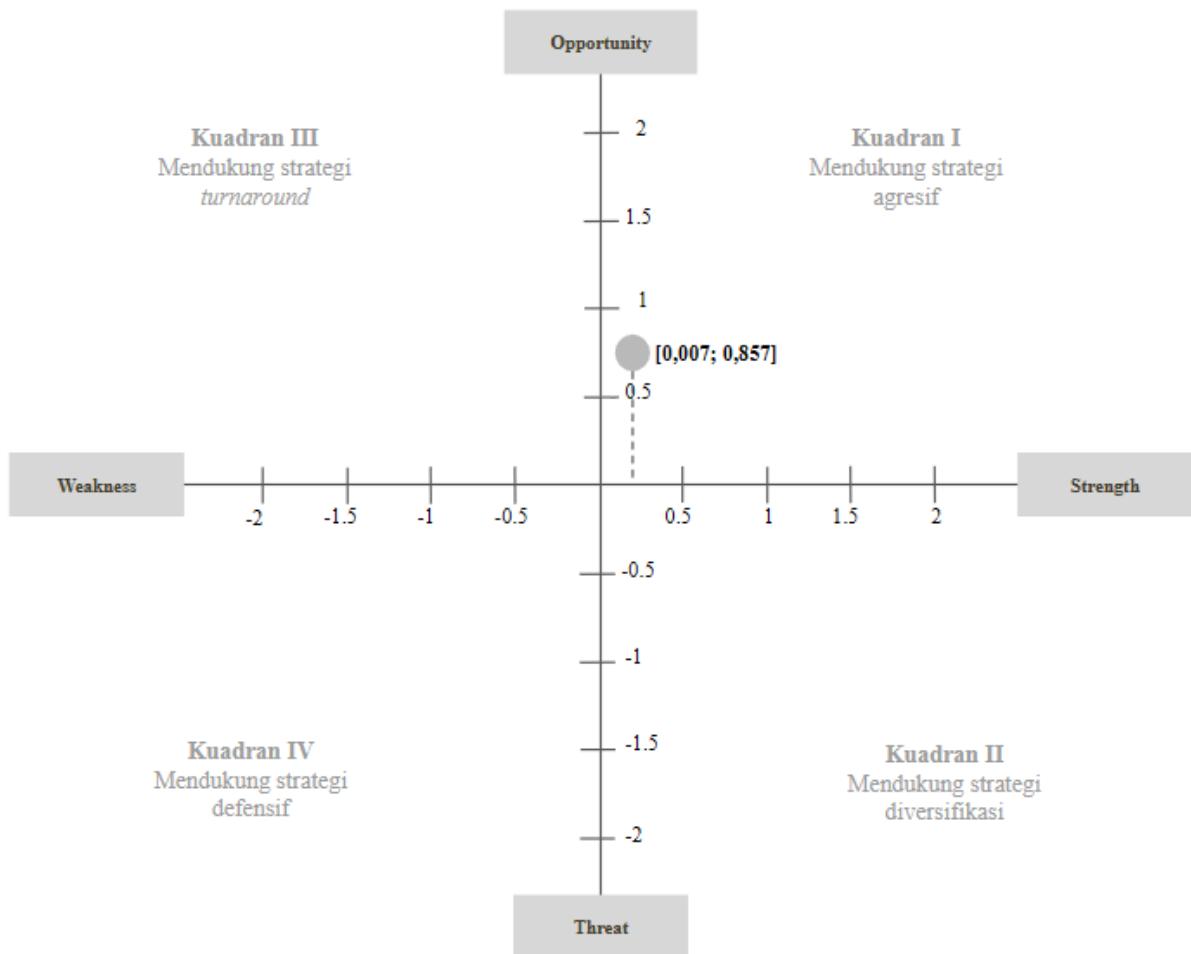
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 4. Ancaman Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon

Opportunity	Sumber	Bobot	Rating	Skor
[T1] Terdapat PLTU yang memiliki dampak terutama dalam merusak ekosistem di Kawasan Mangrove dan sekitarnya	1) Hasil Observasi Lapangan, 2024	0,308	1	0,308
[T2] Adanya isu pembelian kepemilikan tambak garam masyarakat secara sedikit demi sedikit untuk dialihfungsikan	1) Kegiatan Ekonomi Masyarakat Penunjang Ekowisata Desa Pangarengan	0,154	4	0,615
[T3] Adanya pabrik di sekitar Desa Pangarengan yang menyebabkan polusi udara berupa aroma tidak sedap di sekitar pemukiman masyarakat (bau Lar maupun batu bara)	1) Hasil Wawancara Lapangan, 2024	0,231	3	0,692
[T4] SDM yang kurang terlatih serta kurang dikembangkan guna melanjutkan serta meningkatkan potensi yang Desa Pengarengan miliki	1) Hasil Wawancara Lapangan, 2024	0,077	5	0,385
[T5] Terdapat lahan masyarakat yang telah dibeli untuk dijadikan pabrik cat Avian	1) Kondisi Kepemilikan Lahan	0,154	4	0,615
[T6] Kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan kegiatan yang berada di Desa Pengarengan	"1) Hasil Wawancara Lapangan, 2024 2) Hasil Observasi Lapangan, 2024"	0,077	5	0,385
Total		1	22	3,000

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 1. Diagram SWOT Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Policy Brief Pengembangan Kawasan Pesisir Desa Pangarengan yang mendukung Potensi Pariwisata, Industri Kecil dan Menengah, dan Perikanan yang Berkelanjutan dari Segi Penataan dan Pengendalian Ruang.

Author Profile



Andis Destrian Irianto (15421003). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. HMP PL ITB Komisariat



Ferio Zjidan Cassane (15421025). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. HMP PL ITB Komisariat



Fatiya Auliya Haris (15421033). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. HMP PL ITB Komisariat



Zeba Liqueiza Shakira Kudus (15422098). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. HMP PL ITB Komisariat



Muhammad Nabil Hafiz (15422110). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. HMP PL ITB Komisariat



Joshua Yosianto (12921034). Program Studi Oseanografi. HMO TRITON ITB



Ayu Cahyani (12921043). Program Studi Oseanografi. HMO TRITON ITB

